



LAPORAN SINGKAT

RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI BIDANG PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA, DAN BUMN

Rapat ke	: 7 (Tujuh)
Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi RI
Hari, Tanggal	: Rabu, 6 November 2024
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M./Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Pusporini, S.T., M.E., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI; 2. Penjelasan Mitra Kerja terhadap Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025; dan 3. Target Penyelesaian Roadmap Kementerian/Lembaga.
Hadir	: 1. 34 orang dari 46 orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Koperasi, Sdr. Budi Arie Setiadi; 3. Wakil Menteri Koperasi, Sdr. Ferry Juliantono. Beserta Jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada pukul 10.21 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 6 November 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Ketua Komisi VI DPR RI, yakni Ibu Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi RI sepakat untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koperasi RI.
2. Komisi VI DPR RI meminta Menteri Koperasi RI untuk menyampaikan *roadmap* kinerja Kementerian Koperasi sebelum revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian serta *roadmap* penggunaan anggaran Kementerian Koperasi tahun 2025 sebesar Rp 274.450.781.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri Koperasi RI terkait usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2.199.386.375.000,- (*Dua Triliun Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI mendorong Menteri Koperasi RI untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kegiatan dan praktek usaha koperasi termasuk melaksanakan penindakan tegas terhadap kegiatan koperasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. mengupayakan Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian BUMN untuk meningkatkan peranan Koperasi untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka menciptakan keadilan ekonomi sesuai TAP MPR No.XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
 - c. melaksanakan percepatan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam program 100 hari Kementerian Koperasi.
 - d. merumuskan kebijakan dan program kerja dalam rangka meningkatkan peranan koperasi sebagai alternatif akses pembiayaan bagi masyarakat khususnya untuk petani, nelayan dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
 - e. melaksanakan percepatan revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi yang bergerak di sektor riil lainnya.
 - f. melaksanakan percepatan penghapusan hutang Kredit Usaha Tani (KUT).
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.13 WIB.

MENTERI KOPERASI RI

TTD.

BUDI ARIE SETIADI

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M

A-48